



**PANJI KEADILAN**

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

P-ISSN : 2599-1892

E-ISSN : 2622-3724

Vol. 2, No. 1, Januari 2019

**ANALISIS HUKUM PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU (DITINJAU Dari UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)**

**APEN DIANSYAH**

*apengeboy@gmail.com*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

**ABSTRAK**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar berlalu lintas di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan disatuan lalu lintas Polres dan Polda Kota Bengkulu. Adapun data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif. Peraturan yang tertera pada undang-undang yang tertera sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran untuk setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, tetapi pada kota Bengkulu undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif. Menurut pandangan Undang-undang 22 Tahun 2009, penerapan pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain dari itu, faktor penghambat keefektifan Undang-undang seperti faktor ekonomi, faktor kedekatan emosional dan faktor kekebalan institusional.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Hukum Pidana dan denda

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the application of violators from cities in Bengkulu in terms of Law Number 22 of 2009, and to find out the inhibiting factors in the application of fines to traffic violators in the city of Bengkulu. The research was*

*obtained are primary data and secondary data used for library research and research, then the data are analyzed descriptively. The regulations stated in the law that are fully stated to increase awareness for every offender who commits an offense, but in the city of Bengkulu the law is not fully effective. According to the view of Law 22 of 2009, the application of criminal fines falls into the main criminal category (according to Article 10 of the Criminal Code) as the last or fourth order, after the death penalty, imprisonment and imprisonment. Apart from that, factors inhibiting the effectiveness of the law such as economic factors, emotional proximity factors and institutional immune factors.*

**Keywords:** Crime, Criminal Law and fines

## **PENDAHULUAN**

Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas<sup>1</sup>.

Penerapan denda pelanggaran lalu lintas semestinya harus lebih tegas dan lebih membuat efek jera karena bercermin dari aturan denda sekarang yang masih sangat banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan hukum atau denda yang diterapkan tidak membuat efek jera<sup>2</sup>.

Kota Bengkulu merupakan suatu jalan yang menghubungkan antara Provinsi Lampung, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, tidak heran kalau setiap hari terdapat pelanggaran lalu lintas yang tidak sedikitnya timbul

kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor manusia, pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan faktor lingkungan maupun alam. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor manusia yang paling menentukan kelemahan yang timbul diantara faktor-faktor tersebut dapat diatasi apabila pengemudi tersebut dapat berhati-hati dan taat peraturan lalu lintas.

Adanya banyak alasan untuk melanggar dan membuat situasi lalu lintas justru makin tidak menentu. Dari banyaknya faktor, tidak sedikit para pengguna jalan tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya pengendara roda dua harus memperhatikan faktor keselamatan seperti wajib menggunakan helm saat berkendara, tidak hanya itu pengendara harus mematuhi peraturan yang lain seperti kelengkapan kendaraan, surat-surat, tidak boncengan lebih dari satu orang, mentaati rambu-rambu, tidak melawan arus, dan lain-lain. Tidak berhenti pada kendaraan roda dua saja, bahkan pengguna roda empatpun harus mentaati peraturan. Misalnya pengemudi harus memperhatikan laju

---

<sup>1</sup> Suparni, Ninik.2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 18

<sup>2</sup> Komunikasi Mensos dengan *Austus Sunardi, SH. Direktur CV. Community Konstruksi* pada tanggal 04 Maret 2018

kecepatan saat berkendara, beban atau muatan, kelengkapan kendaraan, surat-surat, sabuk keselamatan, rambu-rambu, melawan arus dan lain-lain.

Masyarakat mempunyai peran yang sangat kuat dalam negara sebagai penyeimbang dari kekuasaan negara yang menjalankan tugas dan wewenang pemerintah dalam menjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama, dikarenakan masyarakat terlibat dalam semua segala bidang. Pendekatan sosiologis terhadap hukum menempati peranan yang penting bagi sistem hukum yang ada. Pendekatan sosiologis terhadap hubungan yang dilandaskan pada kekuasaan, penting bagi hukum yang justru bertujuan untuk menciptakan keadilan dari hubungan itu dan mengatur agar dicapai kepastian hukum.

Apabila gejala itu tidak dipahami, maka cepat atau lambat UU No. 22 Tahun 2009 akan menjadi peraturan yang akan dilupakan, karena tujuan dibentuknya undang-undang agar tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat yang diarahkan untuk kesadaran hukum, kepastian hukum serta bantuan hukum

guna mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu melarang serta mengancam suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.

Hukum bukanlah semata-mata merupakan suatu kekuatan untuk menciptakan fasilitas untuk menyederhanakan dan melancarkan interaksi sosial, dan hukum juga bukan hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi merupakan gejala yang berkembang secara mandiri dengan tujuan - tujuan tersendiri pula. Kenyataannya menunjuk-kan, bahwa masalah lalu lintas adalah masalah yang banyak menimbulkan persoalan, karena masalah ini menyangkut ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Namun pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di kota Bengkulu sendiri masih terlalu minim dalam pelaksanaannya tidak seimbang. Salah satu contoh kurangnya kendaraan dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai dengan peraturan yang ada dan rambu-rambu lalu lintas minim disepanjang jalan yang

sesuai dengan penggunaannya serta kurang tegasnya penindakan yang dilakukan oleh petugas satuan lalu lintas.

Pembaharuan di bidang hukum salah satu perwujudannya adalah dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun dengan dibuatnya undang-undang ini ternyata banyak menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat, ahli hukum atau disiplin ilmu lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi undang-undang di masyarakat, sehingga masyarakat menanggapi undang-undang ini dengan rasa terkejut ditambah lagi dengan ketentuan pidana denda yang sangat menyulitkan bagi kalangan masyarakat banyak.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan sendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam suatu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga

terwujud suatu totalitas yang lebih, berdaya guna dan berhasil guna.

Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya disiplin masyarakat serta masih rendahnya atau ringannya denda yang dijatuhkan kepada pelanggar lalu lintas. Jumlah denda yang dijatuhkan pada pelanggar lalu lintas sekarang ini jauh lebih rendah dan pada jumlah denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang mencapai jutaan rupiah.

Meski pada kenyataannya dengan ancaman denda tinggi itu tidak menurunkan jumlah pelanggaran atau meningkatkan kadar disiplin masyarakat pengguna jalan raya dan berdasarkan fakta dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: analisis hukum terhadap pidana denda bagi pelanggaran lalu lintas di kota Bengkulu (ditinjau dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimana penerapan pidana denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota

Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?. 2). Apakah faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar berlalu lintas dikota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini merupakan salah satu penelitian untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi disaat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya yang terjadi. Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang berbeda-beda termasuk juga penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah tidak hanya untuk menjelaskan secara menyeluru masalah yang akan di teliti dan diamati namun juga menjadi pedoman bagi peneliti ketika akan melakukan penelitian.

### **PEMBAHASAN**

### **Penerapan pidana denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Dalam kasus tindak pidana pelanggaran yang terjadi pada Kota Bengkulu, membuat kenaikan dan penurunan grafik tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna roda dua dan roda empat. Jumlah kasus yang dilakukan pengguna roda dua pada tahun 2014 tercatat 6.031 kasus pelanggaran lalu lintas, pada tahun 2015 terjadi peningkatan dari tahun 2014 tercatat 10.379 kasus pelanggaran, pada tahun 2016 terjadi penurunan dari tahun 2015 tercatat 9.773 kasus pelanggaran, pada tahun 2017 terjadi peningkatan dari tahun 2016 tercatat 13.877 kasus pelanggaran dan pada Januari 2014 sampai dengan April 2018 tercatat 4.410 kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada daerah hukum wilayah Kota Bengkulu<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Data-data jenis pelanggaran lalu lintas Roda dua dan empat Kota Bengkulu. Sat Lantas Kota Bengkulu.

Menurut BRIPKA Komang Cakra Y selaku Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bengkulu bagian Penilangan Simpang Lima Kota Bengkulu tentang tingkat pelanggaran dan jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di kota Bengkulu (tanggal, 03 Mei 2018) bahwa<sup>4</sup>;

*Tingkat pelanggaran di kota Bengkulu cukup tinggi, namun pada setiap tahunnya tingkat pelanggaran lalu lintas tersebut tidak menentu kadang menurun dan biasa juga meningkat. Kalau jenis pelanggarannya yaitu Pelanggaran ringan, seperti banyaknya pengguna jalan yang tidak melengkapi kendaraannya dengan surat-surat, tidak memakai helm, tidak melengkapi kendaraannya seperti spion dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.*

Selanjutnya, menurut BRIPKA Komang Cakra Y selaku Anggota Satuan Lalu Lintas Polres kota Bengkulu bagian Penilangan Simpang Lima Kota Bengkulu, upaya apakah yang dilakukan tentang tindakan kepolisian terhadap pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan

agar menjadi efek jera bagi setiap pelanggar untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di kota Bengkulu, yaitu;

*Kami dari pihak Sat Lantas yang bertugas dilapangan akan memberikan tindakan yang tegas kepada pelanggar apabila melakukan kesalahan yang sama, misalnya seperti kesalahan tidak memiliki SIM untuk kedua kali seperti yang telah diatur pada pasal 281 dan 287, untuk pelanggaran yang pertama maka akan kita tahan STNK nya, dan apabila kedua kalinya melakukan pelanggaran yang sama maka akan kita tahan kendaraannya untuk sementara dan dianjurkan untuk memiliki SIM supaya masyarakat tidak melakukan kesalahan yang sama.*

Kemudian Penulis menanyakan bentuk sosialisasi yang di berikan dan tentang upaya kepolisian agar pidana denda pada pelanggaran lalu lintas tersebut efektif. Menurut BRIPKA Komang Cakra Y Anggota Satuan Lalu Lintas Polres kota Bengkulu bagian Penilangan Simpang Lima Kota Bengkulu bahwa;

*Mensosialisasikannya dengan cara menyampaikannya melalui media cetak dan elektronik seperti radio lokal di kota Bengkulu dan terjun langsung ke masyarakat. Contohnya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah agar sejak dini siswa-siswa lebih mengenal dan*

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara penulis dengan BRIPKA Komang Cakra Y selaku anggota satuan lalu lintas polres kota Bengkulu bagian penilangan simpang lima kota Bengkulu pada tanggal 03 Mei 2018

*mematuhi peraturan lalu lintas. Secara tidak langsung upaya kami pihak kepolisian dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga membuat pidana denda tersebut menjadi efektif. Dimana dalam melakukan penindakannya berdasarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.*

Dengan maraknya sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Tempat atau biasa disebut sistem damai dapat menimbulkan citra buruk terhadap polisi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya menurut BRIPKA Komang Cakra Y Anggota Satuan Lalu Lintas Polres kota Bengkulu bagian Penilangan Simpang Lima Kota Bengkulu bahwa;

*Untuk penindakan yang dilakukan di tempat, sesuai dalam aturan yang tertera bahwa sistem tersebut tidak memperbolehkan adanya sistem tersebut karena merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Lebih lanjut upaya penanganan sistem tersebut bahwa Dengan adanya pengaduan dari masyarakat, kami akan selalu membenahi kinerja kepolisian dengan peningkatan pengawasan terhadap petugas dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta memberikan sanksi terhadap petugas yang melakukan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas di TKP berdasarkan peraturan. Jadi sebaiknya untuk seluruh*

*pengguna jalan raya ada baiknya untuk menaati aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa upaya kepolisian lalu lintas polres kota Bengkulu agar mengurangi pelanggaran lalu lintas dan mengefektifkan pidana denda yaitu:

### **1. Upaya Pencegahan**

Upaya pencegahan dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh polisi lalu lintas Kota Bengkulu antara lain :

- a. Penyuluhan tentang berlalu lintas, baik dengan media elektronik maupun media cetak;
- b. Pelatihan berlalu lintas;
- c. Pelayanan pembuatan SIM;
- d. Pemasangan spanduk, baliho, pamphlet dan penyebaran brosur;
- e. Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas.

### **2. Upaya Penindakan**

Upaya penindakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas di kota Bengkulu yang bersifat penindakan, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat penindakan. Upaya penindakan yang dilakukan dengan cara, setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat kita lihat ketika ada operasi/swiping yang dilakukan polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku pelanggaran lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan, kendaraan, surat-surat, maupun marka/rambu.

Adapun tindakan lain adalah menahan kendaraan apabila kendaraan yang terjaring operasi melebihi satu kali pelanggaran dengan pelanggaran yang sama. Selanjutnya aparat akan mengarahkan untuk tidak mengulangi dan sudah melengkapi tindak pidana yang telah dilakukan.

#### **Faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap**

#### **pelanggar berlalu lintas dikota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Sanksi pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), pidana denda sendiri diatur dalam Pasal 30 KUHPidana. Pidana denda dapat diartikan sebagai suatu pidana pokok yang harus dijalani seseorang sebagai hukuman atau timbal-balik dari suatu perbuatan yang telah dilakukan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan hukum pidana dengan cara membayar sejumlah uang.

Di kota Bengkulu sendiri berdasarkan hasil pengamatan Penulis yang terjun langsung melihat terjadinya proses yang dimaksud, adapun faktor-faktor penghambat menyelesaikan pidana denda pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dikarenakan dengan cara damai tidak membutuhkan biaya



yang begitu banyak dibandingkan harus menunggu keputusan pengadilan, misalnya memberikan sejumlah uang kepada petugas lalu lintas supaya tidak harus mengikuti persidangan dikarenakan jauh.

2. Faktor kedekatan emosional, faktor inilah yang masih sulit untuk dihindari oleh aparat kepolisian, karena sistem kekeluargaan maupun kekerabatan masyarakat kota Bengkulu seringkali dikaitkan dalam upaya penegakan hukum. Contoh seorang petugas lalu lintas membebaskan pelanggar lalu lintas dikarenakan masih adiknya sendiri.
3. Faktor kekebalan institusional terhadap hukum, oleh karena timbulnya pengecualian-pengecualian bagi golongan masyarakat yang menduduki posisi-posisi tertentu, atau karena keluarga besar POLRI. Contoh seorang DPR dibebaskan dari pelanggaran lalu lintas dikarenakan segan akan jabatannya.

Dari ketiga faktor tersebut masih ada salah satu faktor yang menghambat tindak pidana denda yang sebagaimana telah diatur dalam UU

Nomor 22 Tahun 2009 seperti kecilnya jumlah nominal denda yang harus dibayar pelanggar untuk menebus pelanggaran setelah persidangan. Seperti penulis ketahui sanksi pidana denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22 Tahun 2009, namun jumlah denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak harus sesuai dengan nilai nominal atau tidak harus sama besar seperti apa yang tercantum dalam Pasal-Pasal yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009, harus dipahami bahwa nominal yang disebutkan dalam setiap Pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009 adalah jumlah maksimal yang diancamkan jadi hakim dapat saja menjatuhkan denda yang lebih ringan dari apa yang telah ditentukan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tersebut dengan berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani namun seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda melebihi besarnya denda yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tersebut.

Selain daripada itu, rendahnya nilai denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas belum bisa sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lalu lintas. Jumlah denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Bengkulu rata-rata Rp. 50.000,00 - Rp. 150.000,00. Jumlah denda tersebut masih sangat jauh dari denda maksimal yang ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 2009.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, penulis menyimpulkan bahwasannya, peraturan yang tertera pada undang-undang yang tertera sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran untuk setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, tetapi pada kota Bengkulu undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif.

1. Menurut pandangan hukum pidana, penerapan pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pidana denda masuk dalam kategori

pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana denda diatur dalam Pasal 30-31 KUHP dan bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 315 memuat denda yang lebih tinggi dari undang-undang yang sebelumnya.

2. Adapun faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar berlalu lintas pada kota Bengkulu seperti
  - a. Faktor ekonomi misalnya memberikan sejumlah uang kepada petugas lalu lintas supaya tidak harus mengikuti persidangan dikarenakan jauh.
  - b. Faktor kedekatan emosional, Contoh seorang petugas lalu lintas membebaskan pelanggar lalu lintas dikarenakan masih adiknya sendiri.
  - c. Faktor kekebalan institusional terhadap hukum, Contoh seorang DPR dibebaskan dari pelanggaran lalu lintas dikarenakan segan akan jabatannya.

kota Bengkulu bagian penilangan simpang lima kota Bengkulu pada tanggal 03 Mei 2018

Data-data jenis pelanggaran lalu lintas Roda dua dan empat Kota Bengkulu. Sat Lantas Kota Bengkulu.

<http://www.tuntasonline.com/2017/12/28/2017-Polda-Bengkulu-kecelakaan-lalulintas-turun-pelanggaran-lalulintas-meningkat/> diakses pada 30 Maret 2018

Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal, 10, 11 Terbitan Dit Lantas Polda Metro Jaya (Perpustakaan Samsat Kota Bengkulu)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta Selatan, Transmedia Pustaka

## **DAFTAR PUSTAKA**

Suparni, Ninik.2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Komunikasi Mensos dengan *Austus Sunardi, SH. Direktur CV. Community Konstruksi* pada tanggal 04 Maret 2018

Hasil wawancara penulis dengan BRIPKA Komang Cakra Y selaku anggota satuan lalu lintas polres